



Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia

Helti Handraini ¹⁾, Aldri Frinald ²⁾, Lince Magriasti ³⁾, Hendranaldi ⁴⁾

^{1,2,3,4)} Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

Email: ¹⁾ heltiandrainichan@gmail.com, ²⁾ aldri@fis.unp.ac.id, ³⁾ lincemagriasti@fis.unp.ac.id, ⁴⁾ hendranaldi@fis.unp.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Oktober 2024]

Revised [27 November 2024]

Accepted [02 Desember 2024]

KEYWORDS

Decentralization And Regional
Autonomy, Performance,
Village Government.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kinerja pemerintahan desa di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang mencakup analisis dokumen, jurnal, dan laporan resmi untuk mengumpulkan informasi dan data terkait desentralisasi, otonomi daerah, serta kinerja pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa, terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam hal kapasitas, pendanaan, dan adaptasi terhadap perubahan global. Pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, kemampuan administratif, dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengelola otonomi secara efektif. Hal ini sering kali menghambat peningkatan kinerja desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan efisien kepada masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut semakin diperparah oleh masalah dalam pengelolaan dana desa dan ketidakmampuan desa dalam merespons tuntutan pembangunan berkelanjutan yang diakibatkan oleh globalisasi.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of decentralization and regional autonomy on the performance of village government in Indonesia, as well as identify the challenges faced in implementing regional autonomy. The research method used is literature study, which includes analysis of documents, journals and official reports to collect information and data related to decentralization, regional autonomy and village government performance. The results of this research show that although decentralization provides greater autonomy to village governments, capacity gaps, challenges in financial management, and adaptation to global change are still significant obstacles in improving the performance of village governments in Indonesia. Although decentralization has given village governments greater authority and independence, there are significant gaps in capacity, funding and adaptation to global change. Village governments still face limitations in terms of human resources, administrative capabilities, and adequate infrastructure support to manage autonomy effectively. This often hinders improving village performance in providing responsive and efficient public services to the community. These challenges are increasingly exacerbated by problems in managing village funds and the inability of villages to respond to demands for sustainable development caused by globalization.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mendistribusikan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistis, keputusan-keputusan penting terkait pengelolaan wilayah kerap kali diambil di tingkat pusat, yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Oleh karena itu, desentralisasi hadir sebagai solusi untuk memberikan otoritas lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri. Tujuan utama dari desentralisasi adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan wewenang yang lebih besar, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi, otonomi daerah menjadi konsep kunci yang memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah, termasuk pemerintahan desa, memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pemberian otonomi ini bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga mengenai tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal demi kemajuan daerahnya. Otonomi daerah menjadi instrumen penting untuk

mempercepat pembangunan wilayah, karena pemerintah desa yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan mereka dan merespons dengan lebih cepat serta tepat.

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi mulai diperkenalkan secara serius pasca-Reformasi 1998, sebuah perubahan besar dari era Orde Baru yang sangat sentralistis. Pada masa Orde Baru, hampir semua keputusan diambil di tingkat pusat, dan pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Namun, setelah Reformasi, terjadi perubahan besar dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menandai era baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.

UU ini memberi kewenangan lebih besar kepada daerah, termasuk desa, untuk mengelola urusan mereka sendiri. Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memperkuat pelaksanaan desentralisasi dengan memperjelas pembagian wewenang antara pusat dan daerah, sehingga desentralisasi dan otonomi daerah menjadi lebih terstruktur.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berkembang. Desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk mengelola berbagai urusan lokal, seperti pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih dekat dan tepat sasaran.

Otonomi ini menciptakan peluang bagi desa untuk memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat. Pemberdayaan ini sangat penting karena desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu harapan besar dari desentralisasi adalah peningkatan kinerja pemerintahan desa. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah desa diharapkan mampu bekerja lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Pemerintahan desa yang otonom dapat lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan lokal, tanpa harus selalu menunggu arahan dari pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan desa untuk menyusun program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Seiring dengan peningkatan kewenangan tersebut, diharapkan juga terjadi peningkatan kualitas tata kelola desa yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Meskipun desentralisasi telah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah desa, penerapannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang belum memadai hingga infrastruktur yang belum merata. Selain itu, kendala dalam distribusi anggaran juga sering menjadi penghambat bagi pemerintahan desa dalam menjalankan program-program pembangunan. Beberapa desa masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tantangan-tantangan ini kerap kali membuat pelaksanaan desentralisasi tidak maksimal dan berdampak pada rendahnya kinerja pemerintahan desa.

Era globalisasi membawa tantangan baru bagi pemerintah daerah dan desa di Indonesia. Globalisasi tidak hanya membawa dampak positif berupa akses ke pasar internasional, teknologi, dan investasi asing, tetapi juga menimbulkan tekanan dalam bentuk persaingan ekonomi global dan tuntutan pembangunan yang lebih berkelanjutan. *Pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan daya saing lokal dalam menghadapi arus globalisasi, sambil tetap menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal.* Hal ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk memastikan bahwa kebijakan desentralisasi tetap relevan dan efektif dalam konteks global yang terus berubah. Dari berbagai tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh desentralisasi, fokus utama yang perlu dibahas adalah bagaimana konsep desentralisasi dan otonomi daerah dapat benar-benar meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Meskipun desentralisasi menawarkan berbagai keuntungan, pelaksanaannya di tingkat desa masih sering menemui berbagai hambatan.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Desentralisasi didefinisikan oleh Rondinelli dan Cheema (1983) sebagai pemindahan tanggung jawab administrasi dan kewenangan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan entitas lokal. Menurut Rondinelli, desentralisasi adalah salah satu strategi penting untuk memperbaiki efisiensi pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi diharapkan mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama di tingkat pemerintahan desa.



Desentralisasi juga dijelaskan oleh Smith (1985) yang menekankan bahwa desentralisasi tidak hanya soal distribusi kekuasaan, tetapi juga tentang pemberian otoritas yang sah bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya. Melalui kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pemerintah Indonesia memberikan otonomi lebih besar kepada daerah, termasuk desa, untuk mengelola urusan lokal mereka secara mandiri. Hal ini memperlihatkan adanya korelasi langsung antara desentralisasi yang efektif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, desentralisasi bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga proses politik yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan.

Konsep Kinerja

Konsep kinerja (performance) dalam organisasi publik sering merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1975), yang mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian tugas yang berhubungan dengan tanggung jawab individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pemerintahan, kinerja merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sebuah pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Selanjutnya, Lebas (1995) menegaskan bahwa kinerja adalah hasil kumulatif dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, kinerja yang baik berarti pemerintah desa mampu menjalankan perannya secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengukuran kinerja desa tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga proses bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Desentralisasi yang baik diharapkan memberikan fleksibilitas kepada desa dalam merespons kebutuhan lokal, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa, sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia, berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Menurut Pendapat Suwondo (1997), desa memiliki otonomi yang cukup luas dalam mengelola urusan lokalnya sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi setempat. Peran penting desa tidak hanya terbatas pada pengelolaan administratif, tetapi juga dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat desa. Sebagai unit terdekat dengan masyarakat, pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan lokal dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program pemerintah.

Dalam pandangan Dwiyanto (2003), pemerintahan desa yang efektif harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif. Dalam konteks desentralisasi, pemerintahan desa mendapatkan otonomi yang lebih besar untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Hal ini memperkuat posisi desa sebagai entitas penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan desa yang otonom dan memiliki kinerja yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan pembangunan nasional dari tingkat akar rumput.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik desentralisasi, otonomi daerah, dan kinerja pemerintahan desa. Studi literatur bertujuan untuk memahami teori-teori yang telah ada serta melihat hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek terkait. Dengan memanfaatkan berbagai referensi seperti jurnal akademik, buku, laporan pemerintah, dan penelitian empiris, penelitian ini berusaha membangun landasan teoritis yang kuat untuk mendalami isu-isu yang dihadapi dalam penerapan desentralisasi di Indonesia.

Studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dalam penelitian sebelumnya, serta menemukan celah atau permasalahan yang belum terjawab. Metode ini sangat penting dalam konteks penelitian desentralisasi, karena melalui kajian literatur, peneliti dapat memahami dinamika yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, metode ini membantu memperkaya pemahaman tentang bagaimana desentralisasi telah memengaruhi kinerja pemerintahan desa, dengan mengambil pandangan dari berbagai perspektif ahli dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sejak era reformasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan lokal. Namun, implementasi otonomi daerah di tingkat desa sering kali menghadapi kesenjangan kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia, kemampuan administratif, maupun dukungan infrastruktur. Perbedaan kapasitas antardesa dalam memanfaatkan otonomi ini memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik. Meskipun tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan lokal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa masih mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan tersebut.

Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten di desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki keterampilan teknis maupun manajerial yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Padahal, kebijakan desentralisasi menuntut desa untuk mampu mengelola anggaran yang lebih besar, membuat kebijakan lokal, dan memastikan pelaksanaan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, desa-desa yang memiliki sumber daya manusia yang terbatas kerap kali mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan, serta menjalankan layanan publik dengan efisien.

Sebagai contoh nyata di lapangan, Desa Tempursari di Jawa Timur mengalami kendala serius dalam pengelolaan dana desa karena keterbatasan kapasitas aparturnya. Tidak ada pelatihan yang memadai terkait pengelolaan keuangan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penganggaran dan pelaksanaan program. Selain itu, minimnya pemahaman tentang regulasi keuangan menyebabkan proses pelaporan menjadi tidak tepat waktu, sehingga alokasi dana sering kali tertunda dan menghambat pembangunan.

Selain itu, kemampuan administratif yang lemah juga menjadi hambatan bagi banyak desa dalam memanfaatkan otonomi yang diberikan. Desa-desa di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan program-program desa. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas program pembangunan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Hal ini terjadi, misalnya, di Desa Sukaraja, Jawa Barat, di mana laporan keuangan sering kali tidak sesuai dengan realisasi anggaran di lapangan, yang akhirnya memicu ketidakpuasan masyarakat setempat.

Kesenjangan kapasitas ini juga terlihat dari perbedaan infrastruktur antara desa-desa yang lebih maju dan desa-desa yang tertinggal. Desa yang memiliki infrastruktur yang memadai cenderung lebih mampu mengelola otonomi daerah secara efektif, sementara desa yang infrastruktur dasarnya masih minim, seperti jalan, listrik, dan akses internet, sering kali tidak mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagai contoh, Desa Sumberagung di Jawa Tengah kesulitan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur karena kurangnya akses ke teknologi informasi yang memadai, yang berakibat pada lambannya proses administrasi dan pelayanan publik.

Permasalahan lainnya adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya, yang menyebabkan desa-desa tertentu memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan desa lain. Desa-desa di wilayah yang lebih berkembang secara ekonomi dan dekat dengan pusat kota cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pelatihan dan sumber daya, sedangkan desa-desa terpencil sering kali tertinggal dalam hal ini. Ketimpangan ini dapat dilihat di banyak daerah pedesaan di Kalimantan dan Papua, di mana pemerintah desa masih berjuang untuk menjalankan program-program pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, kesenjangan kapasitas dalam pengelolaan otonomi desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Meskipun otonomi desa memberikan peluang bagi desa untuk berkembang secara mandiri, perbedaan kapasitas dalam hal sumber daya manusia, kemampuan administratif, dan dukungan infrastruktur terus menjadi penghambat utama. Penguatan kapasitas ini harus menjadi prioritas agar desentralisasi benar-benar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Tantangan Dalam Pendanaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa

Tantangan dalam pendanaan dan pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan diterapkannya desentralisasi, pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, tidak semua desa mampu mengelola dana tersebut secara optimal. Banyak desa masih menghadapi kesulitan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan, yang sering kali berujung pada ketidakefisienan penggunaan



dana, bahkan penyalahgunaan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kemampuan implementasi di tingkat desa.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada tantangan ini adalah kurangnya kapasitas perangkat desa dalam hal manajemen keuangan. Banyak aparat desa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola anggaran, yang menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran. Dalam banyak kasus, perangkat desa belum sepenuhnya memahami mekanisme pengelolaan dana desa, termasuk dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat berdampak pada terlambatnya pencairan dana dan rendahnya kualitas program pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa. Di sinilah pentingnya pelatihan dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan.

Sebagai contoh, di Desa Cibat, Jawa Barat, pengelolaan dana desa mengalami kendala serius karena ketidakmampuan perangkat desa untuk menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan desa. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang seharusnya dilakukan tepat waktu menjadi tertunda atau tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, kurangnya pelatihan terkait pengelolaan dana desa menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik di desa tersebut.

Tantangan lain dalam pengelolaan keuangan desa adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah desa sering kali tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau penggunaan dana, baik dari segi internal maupun eksternal. Pengawasan dari pemerintah daerah kadang tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ditetapkan. Di beberapa kasus, lemahnya pengawasan ini memicu terjadinya penyalahgunaan dana oleh oknum perangkat desa. Contoh nyata terjadi di Desa Manding, Yogyakarta, di mana laporan keuangan menunjukkan adanya ketidakjelasan alokasi dana yang berpotensi mengarah pada korupsi dana desa.

Kurangnya transparansi juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat desa sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana dana tersebut digunakan. Akibatnya, terjadi ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan desa. Contoh kasus ini dapat dilihat di Desa Kalisari, Jawa Tengah, di mana masyarakat setempat mengeluhkan minimnya informasi terkait penggunaan dana desa, yang berujung pada ketidakpuasan dan protes terhadap pemerintah desa.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pendanaan tambahan di luar dana desa yang terbatas. Meskipun desa menerima dana desa dari pemerintah pusat, sering kali dana tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan di desa. Desa-desa dengan pendapatan asli desa yang rendah kesulitan dalam mencari sumber pendanaan lain untuk melengkapi dana desa. Hal ini mengakibatkan program-program pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana secara maksimal. Di banyak desa di Indonesia bagian timur, misalnya, dana desa tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur dasar, sehingga perkembangan desa menjadi tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memainkan peran yang lebih besar dalam membantu desa-desa mengatasi tantangan ini. Selain memberikan pelatihan dan supervisi yang lebih baik, pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih kuat serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Jika tidak, tantangan dalam pendanaan dan pengelolaan keuangan ini akan terus menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen keuangan di tingkat desa, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, serta mendorong transparansi, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat memanfaatkan dana desa secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Adaptasi Pemerintah Desa Terhadap Perubahan Global Dan Tuntutan Pembangunan Berkelanjutan

Adaptasi pemerintah desa terhadap perubahan global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam era desentralisasi. Globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mempengaruhi cara desa merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Di satu sisi, desentralisasi memberikan otonomi lebih kepada pemerintah desa untuk menentukan arah kebijakan lokal, tetapi di sisi lain, hal ini menuntut pemerintah desa untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan yang terjadi di

tingkat global. Perubahan tersebut mencakup isu lingkungan, perubahan iklim, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan yang semakin mendesak.

Salah satu aspek penting dari adaptasi ini adalah bagaimana desa menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Desa-desanya di Indonesia, terutama yang berada di kawasan pesisir dan daerah rawan bencana, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu, naiknya permukaan air laut, dan pergeseran pola cuaca. Meskipun desentralisasi memungkinkan desa untuk mengelola sumber daya alam secara lebih mandiri, banyak desa masih belum memiliki kapasitas atau pengetahuan yang memadai untuk mengimplementasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai contoh, di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, desa-desanya menghadapi ancaman abrasi pantai yang kian memburuk, tetapi pemerintah desa masih kesulitan merencanakan langkah-langkah penanggulangan yang efektif.

Tuntutan pembangunan berkelanjutan juga menciptakan tekanan baru bagi desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi sambil tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan. Globalisasi telah meningkatkan persaingan ekonomi dan ekspektasi terhadap desa untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan-kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata. Namun, sering kali tekanan ekonomi ini membuat desa mengorbankan kelestarian lingkungan, terutama dengan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Sebagai contoh, di banyak desa di Pulau Jawa, penggundulan hutan untuk perluasan lahan pertanian telah mengakibatkan degradasi lingkungan yang serius, seperti longsor dan banjir.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah desa dituntut untuk menemukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global ini. Meskipun mereka memiliki otonomi yang lebih besar untuk mengelola wilayah mereka, banyak desa masih bergantung pada pemerintah pusat dan daerah untuk bantuan teknis dan keuangan dalam merespons perubahan global. Misalnya, di beberapa desa di Lombok, pemerintah desa telah berusaha menerapkan program agrowisata yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sambil meningkatkan ekonomi lokal. Namun, program ini hanya berhasil di desa-desanya yang memiliki dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, sementara desa lain yang lebih tertinggal masih berjuang dengan keterbatasan sumber daya.

Selain masalah lingkungan, globalisasi juga memengaruhi pola pikir dan ekspektasi masyarakat desa. Banyak desa di Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas lokal dan tradisi mereka di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan dalam gaya hidup, pola konsumsi, dan budaya masyarakat desa, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang telah lama dijunjung tinggi. Pemerintah desa perlu berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal, yang sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Tantangan lain yang dihadapi desa adalah kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk merespons perubahan global. Banyak desa di Indonesia masih minim akses internet, pendidikan, dan infrastruktur teknologi lainnya yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan global. Misalnya, desa-desanya di pedalaman Kalimantan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi tentang teknologi pertanian modern yang berkelanjutan, yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas mereka sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Di tengah tantangan globalisasi, keberhasilan adaptasi pemerintah desa terhadap perubahan global sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta. Desentralisasi telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa, tetapi dalam menghadapi isu-isu global yang kompleks, desa memerlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci penting untuk memastikan desa mampu merespons tantangan global secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun desentralisasi memberikan peluang bagi desa untuk mengelola wilayah mereka secara lebih mandiri, tantangan global seperti perubahan iklim, tekanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih terpadu dan kolaboratif. Pemerintah desa harus berperan lebih aktif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tantangan global dengan cara yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tantangan-tantangan dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di tingkat desa, dapat disimpulkan bahwa meskipun desentralisasi telah memberikan



wewenang dan kemandirian yang lebih besar kepada pemerintah desa, terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam hal kapasitas, pendanaan, dan adaptasi terhadap perubahan global. Pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, kemampuan administratif, dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengelola otonomi secara efektif. Hal ini sering kali menghambat peningkatan kinerja desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan efisien kepada masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut semakin diperparah oleh masalah dalam pengelolaan dana desa dan ketidakmampuan desa dalam merespons tuntutan pembangunan berkelanjutan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas, tantangan dalam pengelolaan keuangan desa, serta tekanan akibat globalisasi adalah tiga faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa. Desentralisasi memang menawarkan peluang bagi desa untuk berinovasi dan berkembang, tetapi tanpa peningkatan kapasitas, dukungan infrastruktur, dan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, otonomi desa dapat berakhir dengan hasil yang tidak maksimal. Desa yang lebih maju dengan sumber daya yang memadai cenderung mampu memanfaatkan otonomi yang ada, sementara desa-desa yang tertinggal justru mengalami kesulitan dalam mengelola pembangunan lokal mereka secara mandiri.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa, Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih proaktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah desa terkait manajemen administratif dan pengelolaan anggaran. Program-program peningkatan kapasitas ini harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antara desa-desa yang maju dan tertinggal, sehingga semua desa memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan otonomi mereka secara efektif.
2. Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah pusat perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa melalui pengembangan teknologi digital dan sistem akuntansi yang mudah diakses oleh pemerintah desa. Selain itu, perlu adanya pelatihan intensif bagi aparatur desa mengenai pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel guna mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi alokasi anggaran.
3. Integrasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah desa perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan integrasi kebijakan lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat desa agar mereka mampu merespons tantangan global, seperti perubahan iklim dan globalisasi, dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- GUNAWAN, P. D. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Denpasar Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Irawati, I., & Resdiana, E. (2024). PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP. *Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 52-57.
- Ismail, N. (2018). Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Law Review*, 1(2).
- Lestari, N. A., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Implementasi Kebijakan Desentralisasi di Desa. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6047-6054.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Priatna, H., Anggraeni, I., & Rahmayanti, L. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 13(03), 98-112.
- Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 49-54.

Wahyuni, P. R., & Sigalingging, E. D. (2024). Pengaruh Desa Desentralisasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Manajemen Keuangan Desa. *Mount Hope Management International Journal*, 2(1), 68-82.